



Analisis KR Pilkada dan Partisipasi Warga

Tunjung Sulaksono

TANGGAL 9 Desember 2015 mendatang tiga kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta akan kembali menyelenggarakan Pilkada. Bantul, Sleman dan Kulonprogo bersama dengan ratusan kabupaten/kota serta provinsi di berbagai wilayah di Indonesia akan menjadi bagian dari gelombang pertama dari tiga gelombang Pilkada serentak. Jika ditinjau dari aspek desain, sistem Pilkada saat ini dirancang untuk melibatkan sebanyak mungkin masyarakat atau warga daerah dalam proses Pemilihan Kepala Daerah melalui sebuah proses elektoral yang fair dan terbuka. Pelibatan rakyat ini sejalan dengan konsep penguatan demokrasi di tingkat lokal serta untuk mewujudkan prinsip utama pelaksanaan demokrasi lokal, karena rakyat di daerahlah yang paling memahami jenis pemimpin seperti apa yang paling sesuai dengan karakter dan kebutuhan daerah. Keterlibatan rakyat daerah dalam Pilkada secara ideal akan memunculkan kepala daerah berkualitas hasil pilihan rakyat yang *legitimate* dan *accountable*. Dengan demikian, mau tidak mau, kata kunci dari Pilkada adalah partisipasi.

Proses elektoral dalam Pilkada sendiri secara sederhana dapat diringkas ke dalam tiga unsur utama, meliputi pencalonan,

* Bersambung hal 7 kol 5

V Pilkada Sambungan hal 1

penyelenggaraan dan pengawasan. Pencalonan atau kandidasi merupakan suatu mekanisme untuk mendapatkan kandidat-kandidat yang akan bertarung dalam bursa pemilihan. Meskipun terbuka kesempatan untuk masuk dalam proses kandidasi melalui jalur independen, akan tetapi fakta menunjukkan bahwa organisasi partai politik masih tetap mendominasi tahapan ini. Penyelenggaraan meliputi penentuan sistem pemilihan, pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara hingga aturan main yang digunakan untuk menentukan siapakah kandidat yang akhirnya menang dalam pemilihan tersebut. Sedangkan pengawasan merupakan mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa proses Pemilu berjalan sesuai aturan main dan peraturan yang telah disepakati sebelumnya. Serta melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang muncul selama proses pemilihan ini. Partisipasi masyarakat di daerah dapat diwujudkan dalam sebuah desain saluran sirkulasi kekuasaan yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, yaitu sebuah desain proses elektoral yang berkualitas dan efisien.

Salah satu indikator yang kerap kali dipergunakan mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada adalah tingkat *voter's turn out*. Ketika demokrasi dikaitkan dengan pengakuan pemerintahan oleh rakyat, isu penerimaan atau akseptabilitas pemerintahan oleh rakyat adalah faktor yang sangat penting. Besarnya tingkat partisipasi tentu akan berpengaruh terhadap tingkat legitimasi seorang kepala daerah yang nantinya terpilih. Artinya, semakin besar masyarakat menggunakan hak pilihnya, maka akan semakin kuat pula legitimasi seorang kepala daerah di hadapan masyarakat. Itulah mengapa selama ini tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu seringkali dimaknai dari angka atau

persentase *voter's turn out* saja.

Akan tetapi sebenarnya tidak tepat jika menjadikan *voter's turn out* sebagai satu-satunya indikator keberhasilan Pilkada. Partisipasi masyarakat dalam unsur-unsur elektoral lain tentunya juga harus diperkuat. Dalam proses kandidasi misalnya, partai harus mendengar suaranya masyarakat lokal, tidak sekadar menunggu turunnya *wangsit* berupa surat rekomendasi DPP. Partai pada arasy lokal wajib membangun jalur komunikasi yang intens dengan konstituen agar kandidat yang diajukan benar-benar figur yang mencerminkan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai kandidat yang 'bermasalah' yang justru diusung partai. Pada sisi lain, pengawasan juga merupakan unsur elektoral yang harus melibatkan masyarakat secara luas. Kesadaran untuk menciptakan Pemilu yang berkualitas perlu ditopang proses yang jujur dan bersih harus menjadi *mindset* masyarakat. Adalah hal yang keliru ketika menganggap bahwa pengawasan adalah domain Bawaslu dan jajarannya. Sehingga semua proses terkait pengawasan dibebankan di pundak pengawas. Tanpa partisipasi masyarakat, tidak mungkin pengawasan akan membawa hasil maksimal dalam upaya bangsa ini untuk memperbaiki kualitas Pilkada dengan menekan kemungkinan pelanggaran.

Akhirnya, marilah kita berharap Pilkada di DIY dan di daerah-daerah lain di seluruh pelosok Indonesia dapat berlangsung aman dan damai. Serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat baik dalam pencalonan, penyelenggaraan, dan pengawasan. Sehingga Pilkada dapat meraih predikat sukses baik dari sisi penyelenggaraan maupun hasil. Yang pada akhirnya harapan masyarakat untuk memiliki pemimpin daerah yang terbaik dapat terwujud. (Penulis adalah Dosen Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY dan peneliti *Inspect*-b)